PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

UNIT KERJA : **DINAS KETAHANAN PANGAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LISTYA PUSPITASARI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **854268**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 870.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
5. Tanah Seluas 143 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 491.400.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO J Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 206.400.000
3. MOBIL, MITSUBUSI XPANDER CROSS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 264.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — Rp. 382.800.000

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	604.290.514
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	2.348.490.514
III.	HUTANG	Rp.	----
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.348.490.514

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.